

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut studi "Pekerja Anak: Estimasi Global 2020, Hasil dan Tren" dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), terdapat lebih dari 160 juta pekerja anak di seluruh dunia pada tahun 2020, dengan 97 juta laki-laki dan 63 juta anak perempuan. Jumlah ini, yang mewakili satu dari sepuluh anak di seluruh dunia, telah meningkat sekitar delapan juta selama empat tahun sebelumnya. Sebagian besar anak-anak ini bekerja di pekerjaan yang dianggap sebagai "Pekerja Anak Berbahaya", yaitu pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Anak didefinisikan sebagai individu di bawah usia lima belas tahun yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sesuai dengan Konvensi Usia Minimum ILO No. 138 tahun 1973 Atau didefinisikan sebagai pekerjaan yang mengganggu atau menghalangi potensi pertumbuhan masa kecil, kesehatan fisik, mental, sosial, dan sikap moral pada anak (ILO, 2021).

Masalah pekerja anak sudah menjadi salah satu perhatian bagi Organisasi Internasional, masalah ini sebenarnya sudah lama ada dan kebanyakan terjadi pada negara-negara berkembang dari segi perekonomian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebagaimana halnya, faktor terjadinya persoalan pekerja anak juga berbeda-beda bisa antara negara atau industri. Upaya untuk mempertimbangkan dalam segi global dalam mengakhiri pekerja anak, maka di terbitkanlah organisasi internasional

oleh PBB di antaranya ILO-IPEC, UNICEF, SDGs *Sustainable Deveopment Goals* (pembangunan berkelanjutan), dimana laporan ini menjelaskan bahwa skala dan karakteristik utama pekerja anak saat ini bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Banyak negara yang menyertakan data laporan tenaga kerja nasional tentang pekerja anak kepada *International Conference of Labour Statisticians* (ICLS) untuk menegaskan bahwa segala jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak harus di pertimbangkan dari segi pengukuran dan kegiatan (Nair, 2004).

Langkah pertama untuk menyusun suatu informasi dalam mengambil kebijakan yaitu fakta-fakta sumber informasi yang diambil meliputi Organisasi Internasional, Kantor Departemen Pemerintah, Biro Statistik Pusat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi masyarakat sipil atau organisasi masyarakat, pemerintah kota dan desa, Lembaga Pendidikan, dan Organisasi Non-Pemerintah. Informasi yang sudah ada dari statistik, atau pemberitaan yang muncul di media massa melakukan penelitian atau penilaian penelitian dengan benar baik melalui mandiri maupun melalui kerjasama pada organisasi non pemerintah dengan menggunakan angket, diskusi kelompok dan wawancara secara langsung. Sebagaimana dinyatakan oleh Guy Ryder, Direktur Jenderal ILO, perkiraan tersebut berfungsi sebagai pesan peringatan. Kita tidak boleh tetap menjadi pengamat pasif dalam menghadapi bahaya kelompok anak-anak yang akan datang (Al-Ansori, 2022).

Awal Mula berdirinya ILO di bentuk melalui perjanjian Versailles di Jerman setelah berakhirnya perang dunia pertama dimana ingin menciptakan sebuah keyakinan dalam perdamaian abadi secara universal. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

didirikan sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 dan bekerjasama untuk menciptakan sebuah tujuan dalam perlindungan sosial bagi tenaga kerja, anak, gender laki-laki maupun perempuan, serta mengutamakan hak di dalam pekerjaan yang layak, mendorong pekerjaan yang produktif, adil, dan aman. ILO ingin memastikan bahwa pekerja anak menjadi prioritas utama bagi PBB, pemerintah, media, dan opini publik di seluruh dunia (ILO, 2009).

ILO menetapkan standar-standar inti dalam ketenagakerjaan dimana standar ini merupakan Perjanjian-perjanjian Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang mengatur hak asasi manusia sangatlah penting. Hak asasi manusia saat ini menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan dalam organisasi-organisasi internasional modern, khususnya dalam hal pekerja anak di tempat kerja dan hak-hak dasar pekerja. Melalui penetapan pedoman, penyediaan bantuan teknis, dan promosi reformasi, konvensi-konvensi ini berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disebabkan oleh pekerja anak. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh setiap orang dan harus dihormati dan dilindungi tanpa kecuali. ILO juga menjalankan berbagai *projects* untuk mengatasi permasalahan anak setiap tahunnya diberbagai negara. ILO pertama kali memberikan bantuan proyek bernama "*Smokey Mountain project*" Ini merujuk pada anak-anak yang bekerja di tempat pembuangan sampah distrik Tondo sebagai pemulung, Kota Manila pada tahun 1980. Kemudian tahun 1992 melalui bantuan dan kerjasama dengan pemerintah Jerman dengan ILO terbentuklah sebuah program *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) (ILO, 1992).

Dalam melindungi pekerja anak di dunia. Program *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) yang dijalankan di 107 negara dalam skala global yang memiliki tujuan khusus untuk menangani pekerjaan anak secara menyeluruh dan progresif. Salah satu pendekatan potensial ini untuk mengatasi masalah dalam melibatkan berbagai pihak dalam implementasi programnya serta mendapatkan bantuan dan dukungan staf kantor pusat dan lapangan, IPEC memberikan saran teknis, menyediakan data, membuat penelitian dan evaluasi guna menyusun kerangka yang komprehensif dan efisien untuk mengatasi persoalan pekerja anak. Kemudian tahun 2015 dengan penggabungan antara ILO *technical cooperation programmes* dan Berdasarkan fondasi IPEC sebelumnya, Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) telah meluncurkan inisiatif baru yang berfungsi sebagai program unggulan, dengan tambahan selain fokus dalam pekerja anak, IPEC juga fokus terhadap isu kerja paksa dan perdagangan manusia. Program IPEC merupakan komponen integral dari inisiatif ILO yang lebih luas yang dikenal sebagai Agenda Pekerjaan yang Layak (Alyssa, 2022).

Dalam mengimplementasikan rencana aksi *National* pemerintah *The International Initiative to End Child Labor* (IPEC) telah melaksanakan beberapa tahap pendukung I dan II. Proyek ini berhasil mendapatkan persetujuan untuk membantu mengembangkan didalam kemampuan serta pihak yang memiliki kepentingan dalam mengatasi masalah pekerja anak untuk selalu terus bisa mengembangkan basis pengetahuan di dalam persoalan pekerja anak. Program ini sejalan dengan Sustainable Deveopment Goals (SDGs) yaitu target penghapusan seluruh bentuk pekerja anak dan seluruh bentuk

perbudakan dan perdagangan manusia pada tahun 2030 (Proyek Pekerja Anak, 2022).

Penyebab persoalan pekerja anak di Myanmar menjadi salah satu masalah untuk di tinjau lebih lanjut, masalah ini di mulai karena faktor konflik berkepanjangan di beberapa wilayah di negara dan mengalami curah hujan lebat dan banjir serta rentan terhadap angin topan, gempa bumi, tanah longsor, dan kekeringan. Pada umumnya, bencana dan konflik mempunyai dampak buruk terhadap kehidupan keluarga miskin, dan anak-anak cenderung menjadi pekerja anak. Dari beberapa anak menjadi yatim piatu, beberapa keluarga kehilangan rumah dan mata pencaharian. Faktor pendorong ini adalah anak-anak melakukan pekerjaan yang membahayakan perkembangan fisik dan mentalnya. Selain itu, salah satu penyebab utama pekerja anak yaitu dalam segi perekonomian dan dinegara Myanmar belum menetapkan standar hukum dan sistem tuntutan dosmetik untuk menangani persoalan pekerja anak. Di Myanmar sendiri anak-anak lebih memilih bekerja dibanding untuk sekolah (pendidikan) ada dua kategori utama pekerja anak di Myanmar pekerja anak dalam dosmetik dan pekerja anak dikawasan industri. Karakteristik ini memiliki pekerja berbasis umum seperti bekerja di rumahan dan tenaga kerja tersembunyi (ILO, 2018).

Di Myanmar tidak ada ketentuan khusus terhadap pekerja anak itulah dimana salah satu tantangan yang dihadapi aksi melawan pekerja anak didaerah perkotaan maupun pedesaan yang memiliki banyak pekerja anak, terlihat jelas bahwa beberapa anak terlibat dalam situasi berbahaya, atau bekerja dengan bahan kimia dan pestisida, dipertanian atau dengan mesin yang berbahaya. Anak-anak ini bekerja karena beberapa tekanan yang mereka rasakan untuk tidak menghindarinya, terlepas dari kenyataan

bahwa anak-anak menerima kompensasi yang tidak memadai, mereka terus memainkan peran penting dalam menambah penghasilan keluarga di negara-negara berkembang. Adanya kendala di sektor pendidikan juga dapat dikaitkan dengan isu pekerja anak. Tantangan-tantangan ini mencakup faktor-faktor seperti aksesibilitas sekolah yang terbatas dan standar pendidikan yang tidak memadai, yang dapat menghambat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Orang tua berpendapat bahwa pekerjaan adalah hal yang baik untuk usia anak dibawah 17th karena untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga yang merupakan alasan utama orang tua terus menggunakan tenaga kerja anak dengan ekspetasi keluarga yang tinggi (Yangon, 2018).

Persoalan ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan, kemiskinan, bencana alam, dan utang keluarga merupakan pendorong utama pekerja anak di daerah perkotaan Kayin Yangon, Ayeyarwaddy, Bago, Mon dan Shan. Di Myanmar ada banyak tantangan dan hambatan untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk mengahapus pekerja anak di Myanmar dukungan dari pemerintah menjadi penting, dan pemerintah saat ini sedang melakukan investigasi sekala besar yang menyeluruh efektif, dan transparan terhadap praktik pekerja anak dan pelanggaran HAM. Selain itu, masalah utama dalam mencegah pekerja anak dari eksploitasi adalah masyarakat umum tidak mengetahui undang-undang usia kerja minimum anak. Misalnya tidak mengetahui ketentuan usia kerja minimum dan batasan jam kerja bagi anak-anak. Oleh karena itu kesadaran masyarakat akan ketentuan hukum terpenting yang berkaitan dengan pekerja anak sangat dibutuhkan (Stars and Committee, 2017).

Myanmar masih menghadapi masalah pekerja anak, seperti yang ditunjukkan oleh survei pertama yang dilakukan negara tersebut bersama ILO pada tahun 2014, di mana terdapat sekitar 1.650.000 pekerja anak dan kategorikan terlibat dalam masalah pekerja terburuk untuk anak. Pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sekitar 602.701-600.000 anak yang teridentifikasi sebagai pekerja anak yang berkegiatan pekerjaannya beresiko dan pekerjaan lainnya (jumlah penurunan pekerja anak). Prediksi menunjukkan bahwa situasi menjadi lebih buruk dari 8,9 juta anak lainnya didorong menjadi pekerja anak pada akhir tahun 2022, karena meningkatnya kemiskinan, kesehatan, konflik politik yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Dengan menganalisis peran Program My-PEC dalam mengatasi pekerja anak pada tahun 2018-2022, khususnya pada saat pandemi Covid-19 terjadi, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana organisasi kemanusiaan, dan kontribusi dapat berperan dalam mengatasi pekerja anak di Myanmar, serta bagaimana kerjasama internasional dapat meningkatkan efektivitas dalam upayanya. Masalah pekerja anak ini telah menjadi perhatian utama Myanmar sejak lama. Myanmar telah berupaya menghentikan dan mengurangi maraknya pekerja anak. Langkah-langkah untuk memperbaiki undang-undang dan peraturan terkait pekerja anak telah dilakukan dengan mencakupi kerjasama berbagai aktor seperti organisasi dan masyarakat sipil (Win and Siriwato, 2020).

Meskipun Myanmar telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada, pekerja anak masih terjadi di negara tersebut, yang telah menarik perhatian Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Tujuan utama ILO di Myanmar mencakup fasilitasi hak-hak anak, pemajuan peluang untuk pekerjaan yang layak, dan

penyediaan perlindungan sosial bagi buruh yang terkena masalah. Mereka dipilih karena memiliki program yang sedang dilaksanakan terkait dengan pekerja anak. Mereka juga memperjuangkan hak pekerja anak atas pendidikan dan memiliki pengalaman dalam persoalan pekerja anak selama lebih dari 5 tahun. Pemerintah Myanmar memprakarsai pengesahan Rencana Aksi Nasional untuk Pencegahan dan Pengurangan Pekerja Anak 2018–2022 (ILO, 2019).

Yang pertama ILO telah mengeluarkan berbagai proyek dan upaya untuk pemenuhan dalam tujuannya, dan pemerintah Myanmar melalui kementerian tenaga kerja, keimigrasian, dan kependudukan membentuk kementerian khusus untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam praktik pekerja anak. Sementara itu, Direktur Jenderal Pabrik dan Umum (FGLLID) ditunjuk sebagai anggota Komite Nasional untuk Hak Anak. Komite ini bekerja sama dengan Departemen Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Pekerja ILO-UNICEF untuk mencapai kedua tujuan penghapusan pekerja anak di Myanmar (Dwi, 2017).

Sedangkan untuk mengatasi pekerja anak di Myanmar ILO telah mengeluarkan sebuah proyek bernama *Myanmar Program on the Eliminations Child Labour My-PEC* dan *Myanmar Mobile Education Project MYMe*. Dalam Tujuan Proyek My-PEC untuk meningkatkan kapasitas jaringan nasional dan lokal untuk memitigasi dan mengurangi prevalensi pekerja anak melalui pembentukan intervensi yang komprehensif dan efektif. Proyek ini bertemu dengan Komite Urusan Etnis Majelis Tinggi (Amyotha Hluttaw) pada tanggal 8 Maret 2017 untuk meningkatkan kesadaran serta berbagi data mengenai pekerja anak dan mendiskusikan pengembangan Rencana Aksi Nasional

mengenai pekerja anak. Sampai saat ini My-PEC mengimplementasikan dengan proyek *Technical and Vocational Education Training* (TVET) hadir sebagai salah satu peran penting sistem pendidikan di negara berkembang. Dan didorong oleh Daw Aung San Su Kyi untuk memberi nasihat tentang peran program TVET bahkan sebagai penasihat negara. Namun masalahnya adalah kriteria program TVET saat ini tinggi dan tidak praktis untuk remaja yang tidak dapat menyelesaikan standar matrikulasi. Mereka menerima pemuda-pemuda yang lulus matrikulasi saja (Bainus and Rachman, 2022).

Sedangkan program MyMe telah berkembang menjadi 60 staf dan 5 bus kelas keliling pada tahun 2018. Lebih dari 10.000 anak-anak yang bekerja dan putus sekolah telah terbantu melalui program ini. MyME menunjukkan bagaimana organisasi ini terus berkembang dan menemukan cara yang lebih efektif untuk menjangkaunya lebih banyak anak. Diukur ada tingkat kehadiran 87% dan lebih dari 3.000 anak dibantu setiap tahunnya. Dan upacara penyelesaian yang dilakukan untuk siswa yang lulus pada levelnya masing-masing (ILO, 2022).

Pada bulan Desember 2016, MyPEC bersama dengan YPF menyelenggarakan lokakarya jurnalis foto yang berfokus pada pekerja anak. Mulai tanggal 3 Maret hingga 19 Maret 2017, Pameran Yangon Photo Festival (YPF) berlangsung di Taman Mahar Bandula di depan Balai Kota, salah satu tempat yang paling sering dikunjungi dan penuh warna di Yangon. Pada tanggal 12 Maret, proyek MyPEC berpartisipasi dalam Festival Foto ini sebagai bagian dari kampanye kesadaran masyarakat Proyek mengenai isu pekerja anak. Pada bulan April 2017, dengan dukungan MyPEC, organisasi pekerja, AFFM-IUF, MICS, CTUM, menyediakan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3), Pekerja Anak, standar internasional dan undang-undang nasional, pekerjaan berbahaya, hak-hak dan permasalahan pekerja termasuk upah, dan isu-isu kesadaran lingkungan kepada anak-anak muda yang bekerja, orang tua mereka dan anggota masyarakat di kelurahan dan desa sasaran percontohan di Dagon Seik Kan, Labutta dan Ye. Dan mendapatkan 455 peserta pada rangkaian ini (Myanmar,2017).

Program Myanmar untuk Penghapusan Pekerja Anak (My-PEC) adalah proyek ILO yang berdurasi empat tahun dan bertujuan untuk mengembangkan respons multi-pihak yang komprehensif, inklusif dan efisien untuk mengurangi pekerja anak di Myanmar. Informasi yang terkandung dalam hal ini hanya mencerminkan beberapa kegiatan dan keluaran yang telah dihasilkan proyek ini sejak dimulainya proyek ini secara resmi. Karena informalitas tersebar luas di negara-negara yang tercakup dalam proyek ini, maka ILO dengan segala upaya akan dilakukan agar pengawasan ketenagakerjaan dapat melakukan intervensi di tempat kerja informal dan agar serikat pekerja dan organisasi pengusaha dapat mencakup wilayah pemukiman serta lokasi kerja (Child Labour in Myanmar, 2020).

Proyek tahap My-PEC selanjutnya Dengan mengurangi kerentanan terhadap pekerja anak, tujuan inisiatif ini adalah untuk berkontribusi secara permanen terhadap penghapusan pekerja anak dan dengan demikian mencapai SDG 8.7. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, pekerja anak tidak dapat ditangani sendirian. Hal ini harus diarusutamakan ke dalam kebijakan sosio-ekonomi yang lebih luas dan melibatkan berbagai departemen pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan lokal.

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menyediakan dana sebesar \$6.250.000 untuk inisiatif My-PEC selama tahap pertamanya, yang berlangsung dari tahun 2014 hingga 2017. Selain itu, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bekerja sama dengan banyak mitra selama bertahun-tahun, termasuk pemerintah Burma dalam menjalankan proyek My-PEC dalam menangani persoalan pekerja anak. Upaya yang berkelanjutan dari My-PEC, di perpanjang pada bulan Desember 2021. Proyek ini dapat diperpanjang lagi untuk terus mendukung penghapusan pekerja anak di Myanmar, atau struktur permanen yang dapat dibuat. Dengan terus fokus pada isu pekerja anak di Myanmar, dan perubahan yang dilakukan selama delapan tahun terakhir dapat terus membantu anak-anak.

Setelah membaca justifikasi latar belakang dan masalah yang dikemukakan di atas, penulis termotivasi untuk menyelidiki dan mempelajari lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menjadikan kejadian ini sebagai proyek penelitian dengan judul **“PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) MELALUI MYANMAR PROGRAM ON THE ELIMINATION OF CHILD LABOUR (MY-PEC) DALAM MENANGANI PERSOLAAN PEKERJA ANAK DI MYANMAR”**

1.2. Perumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah penelitian dengan cara ini, dengan mempertimbangkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diberikan

sebelumnya yaitu **“Bagaimana implementasi proyek Myanmar Program on the Elimination of Child Labour (MY-PEC) oleh ILO dalam menangani kasus pekerja anak di Myanmar periode 2018-2022?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Penulis harus mendefinisikan situasi secara lebih tepat berdasarkan kekhawatiran yang dikemukakannya dan berkonsentrasi agar fokus utamanya adalah pada inisiatif ILO untuk menangani pekerja anak di Myanmar melalui program MY-PEC.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi yang dialami pekerja anak di Myanmar.
2. Untuk mengetahui peran ILO melalui program My Pec dalam menangani kasus pekerja anak di Myanmar.
3. Untuk mengetahui pencapaian dan hambatan dari implementasi program My Pec di Myanmar.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai peran ILO dalam menangani masalah pekerja anak yang khususbya terjadi di Myanmar dan diharapkan pembaca mampu memperoleh informasi dan manfaat dari penelitian ini.
2. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah Skripsi pada program studi